



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 4 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur/Bupati/Wali Kota wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD Perubahan) Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD Perubahan) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 2 bulan Agustus tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat : 1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
 11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 112);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

Dan

BUPATI KONAWE SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

APBD Perubahan terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

APBD Perubahan Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2023 Berjumlah Rp 1.989.388.569.434 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp 1.582.029.011.203
b. Belanja Daerah	Rp 1.984.388.569.434
	(<i>De fisit</i>)/Surplus (Rp 402.359.558.231)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp 407.359.558.231
2. Pengeluaran	Rp 5.000.000.000
	Pembiayaan Netto Rp 402.359.558.231

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 1.582.029.011.203 (*Satu Triliun Lima Ratus Delapan Puluh Dua Milyar Dua Puluh Sembilan Juta Sebelas Ribu Dua Ratus Tiga Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli; dan
- b. Pendapatan transfer.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 104.398.968.083 (*Seratus Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 40.290.569.818 (*Empat Puluh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 8.165.000.000 (*Delapan Milyar Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 6.914.638.149 (*Enam Milyar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 49.028.760.116 (*Empat Puluh Sembilan Milyar Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Enam Belas Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.477.630.043.120 (*Satu Triliun Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.428.749.417.725 (*Satu Triliun Empat Ratus Dua Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 48.880.625.395 (*Empat Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 6

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 1.984.388.569.434 (*Satu Triliun Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp 1.138.432.825.044 (*Satu Triliun Seratus Tiga Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;

- c. Belanja bunga;
- d. Belanja subsidi;
- e. Belanja hibah; dan
- f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 596.367.008.949 (*Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 473.351.511.362 (*Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 17.500.000.000 (*Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0 (*Nol Rupiah*).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 51.214.304.733 (*Lima Puluh Satu Milyar Dua Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0 (*Nol Rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp 489.370.137.390 (*Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah;
- b. Belanja modal peralatan dan mesin;
- c. Belanja modal bangunan dan gedung;
- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
- e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
- f. Belanja modal aset lainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.765.720.000 (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 111.175.617.496 (*Seratus Sebelas Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 200.442.548.366 (*Dua Ratus Milyar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 166.992.182.728 (*Seratus Enam Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 935.268.800 (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah*).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 6.058.800.000 (*Enam Milyar Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp 12.600.000.000 (*Dua Belas Milyar Enam Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp 343.985.607.000 (*Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja bagi hasil; dan
 - Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0 (*Nol Rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 343.985.607.000 (*Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Rupiah*).

Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 407.359.558.231 (*Empat Ratus Tujuh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 12

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp 407.359.558.231 (*Empat Ratus Tujuh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Pinjaman Daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 407.359.558.231 (*Empat Ratus Tujuh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*).
- (3) Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah).

Pasal 13

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp 5.000.000.000 (*Lima Milyar Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penyertaan modal daerah; dan
 - b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 5.000.000.000 (*Lima Milyar Rupiah*).
- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0 (*Nol Rupiah*).

Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp 402.359.558.231) (*Minus Empat Ratus Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 402.359.558.231 (*Empat Ratus Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Konawe Selatan tahun anggaran 2023, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.-

Pasal 16

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD Perubahan yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD Perubahan yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD Perubahan menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD Perubahan;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD Perubahan;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahunjamak (*multy years*);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan sebagai landasan operasional Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Andoolo, 18 September 2023
BUPATI KONAWE SELATAN
SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo

pada tanggal, 18 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 4

NOMOR REGISTER RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023 : (4/34/2023)

LAMPIRAN I

**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG
DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA,
DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe Selatan
Nomor : 4 Tahun 2023
Tanggal : 18 September 2023

KABUPATEN KONAWE SELATAN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	106.614.594.751	104.398.968.083	(2.215.626.668)	2 %
4.1.01	Pajak Daerah	40.290.569.818	40.290.569.818	0	0 %
4.1.02	Retribusi Daerah	27.095.000.000	8.165.000.000	(18.930.000.000)	70 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.543.373.285	6.914.638.149	371.264.864	6 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	32.685.651.648	49.028.760.116	16.343.108.468	50 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.455.000.178.640	1.477.630.043.120	22.629.864.480	2 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.416.143.686.000	1.428.749.417.725	12.605.731.725	1 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	38.856.492.640	48.880.625.395	10.024.132.755	26 %
	Jumlah Pendapatan	1.561.614.773.391	1.582.029.011.203	20.414.237.812	1 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	1.059.788.083.959	1.138.432.825.044	78.644.741.085	7 %
5.1.01	Belanja Pegawai	610.364.403.204	596.367.008.949	(13.997.394.255)	2 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	376.037.609.472	473.351.511.362	97.313.901.890	26 %
5.1.03	Belanja Bunga	17.500.000.000	17.500.000.000	0	0 %
5.1.05	Belanja Hibah	55.886.071.283	51.214.304.733	(4.671.766.550)	8 %
5.2	BELANJA MODAL	364.270.698.119	489.370.137.390	125.099.439.271	34 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	650.000.000	3.765.720.000	3.115.720.000	479 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.140.054.780	111.175.617.496	29.035.562.716	35 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	167.862.976.977	200.442.548.366	32.579.571.389	19 %

5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	107.309.116.362	166.992.182.728	59.683.066.366	56 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	824.750.000	935.268.800	110.518.800	13 %
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	5.483.800.000	6.058.800.000	575.000.000	10 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	12.600.000.000	12.600.000.000	0	0 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	12.600.000.000	12.600.000.000	0	0 %
5.4	BELANJA TRANSFER	341.664.461.900	343.985.607.000	2.321.145.100	1 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	341.664.461.900	343.985.607.000	2.321.145.100	1 %
	Jumlah Belanja	1.778.558.090.562	1.984.388.569.434	205.830.478.872	12 %
	Total Surplus/(Defisit)	(216.943.317.171)	(402.359.558.231)	(185.416.241.060)	-85 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	221.943.317.171	407.359.558.231	185.416.241.060	84 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	221.943.317.171	407.359.558.231	185.416.241.060	84 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	221.943.317.171	407.359.558.231	185.416.241.060	84 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0 %
	Pembiayaan Netto	216.943.317.171	402.359.558.231	185.416.241.060	85 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. KA. BAPPEDA	
3. KA. BKAD	
4. KA. BAPENDA	
5. KABID. ANGGARAN	
6.	



Bupati Konawe Selatan

BRUNUDDIN DANGGA

LAMPIRAN II

RINGKASAN PERUBAHAN APBD

YANG DIKLASIFIKASI MENURUT

URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN KONAWE SELATAN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan					
		Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja				
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	42.325.713.624	571.629.681.217	252.256.163.597	0	0	823.885.844.814	39.738.822.092	584.735.220.392	329.445.792.856	0	0	914.181.013.248
1 0 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	0	323.479.116.934	46.523.622.680	0	0	370.002.739.614	0	317.706.348.004	53.296.370.589	0	0	371.002.718.593
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0	323.479.116.934	46.523.622.680	0	0	370.002.739.614	0	317.706.348.004	53.296.370.589	0	0	371.002.718.593
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	41.825.713.624	178.943.568.952	89.880.695.823	0	0	268.824.264.775	39.238.822.092	186.457.361.046	100.298.079.065	0	0	286.755.440.111
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN	16.822.766.634	126.336.041.478	85.298.945.925	0	0	216.34.987.403	12.803.827.796	131.835.226.292	94.517.760.427	0	0	226.352.986.719
1 02	1.02.0.0.0.0.00.01.0001 RS KONAWE SELATAN	19.000.000.000	39.164.604.587	4.513.749.898	0	0	43.678.354.485	19.000.000.000	39.624.245.842	5.380.449898	0	0	45.004.695.740
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0002 PUSKESMAS RANOMEETO	809.820.000	2.251.541.491	38.000.000	0	0	2.289.541.491	1.089.130.000	2.561.037.130	83.000.000	0	0	2.644.037.130
1 02	1.02.00.0.00.01.0010 PUSKESMAS TINANGGEEA	1.508.053.200	3.150.858.892	0	0	0	3.150.858.892	1.860.900.888	3.587.337.532	61.769.648	0	0	3.649.107.180
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0014 PUSKESMAS PUNGGALUKU	1.724.548.940	3.173.612.167	0	0	0	3.173.612.167	1.724.548.940	3.096.190.981	77.417.642	0	0	3.173.608.623
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0019 PUSKESMAS KONDA	776.885.600	2.137.237.438	30.000.000	0	0	2.167.237.438	1.322.716.468	2.700.487.769	71.656.950	0	0	2.772.144.719
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0020 PUSKESMAS MOTAHA	1.183.637.250	2.729.672.899	0	0	0	2.729.672.899	1.437.698.000	3.052.835.500	106.024.500	0	0	3.158.860.000
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	500.000.000	36.199.803.599	105.063.541.394	0	0	141.263.344.993	500.000.000	39.352.673.477	163.737.811.602	0	0	203.090.485.079
1 03	1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	500.000.000	36.199.803.599	105.063.541.394	0	0	141.263.344.993	500.000.000	39.352.673.477	163.737.811.602	0	0	203.090.485.079
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	5.534.216.148	5.485.214.800	0	0	11.019.430.948	0	5.131.299.818	7.122.494.800	0	0	12.253.794.618
1 04	1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	0	5.534.216.148	5.485.214.800	0	0	11.019.430.948	0	5.131.299.818	7.122.494.800	0	0	12.253.794.618
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN	0	18.160.476.982	4.517.460.600	0	0	22.677.937.582	0	24.139.959.462	4.177.611.000	0	0	28.317.570.462

KABUPATEN KONAWA SELATAN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
		Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja					
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
	KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
1 05	1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0	7.791.515.756	4.00375.000	0	0	8.191.890.756	0	10.063.948.034	508.800.000	0	0	10.572.748.034	
1 05	1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	0	6.613.849.576	2.741.085.600	0	0	9.354.935.176	0	10.009.423.764	1.539.503.700	0	0	11.548.927.464	
1 05	1.05.105.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	3.755.111.650	1.376.000.000	0	0	5.131.111.650	0	4.066.587.664	2.129.307.300	0	0	6.195.894.964	
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	0	9.312.498.602	785.628.300	0	0	10.098.126.902	0	11.947.578.585	813.425.800	0	0	12.761.004.385	
1 06	1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL	0	9.312.498.602	785.628.300	0	0	10.098.126.902	0	11.827.278.585	813.425.800	0	0	12.640.704.385	
1 06	1.06.1.05.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	0	0	0	0	0	0	120.300.000	0	0	0	120.300.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.715.000.000	88.726.241.733	49.316.345.184	0	0	138.042.586.917	6.715.000.000	99.123.390.665	57.647.783.122	0	0	156.771.173.787	
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	250.000.000	5.941.777.633	2.785.038.700	0	0	8.726.816.333	250.000.000	6.625.749.028	3.339.873.700	0	0	9.965.622.728	
2 07	2.073.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	250.000.000	5.941.777.633	2.785.038.700	0	0	8.726.816.333	250.000.000	6.625.749.028	3.339.873.700	0	0	9.965.622.728	
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0	6.075.039.185	785.499.350	0	0	6.860.538.535	0	8.084.919.944	966.499.350	0	0	9.051.419.294	
2 08	2.08.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0	6.075.039.185	785.499.350	0	0	6.860.538.535	0	8.084.919.944	966.499.350	0	0	9.051.419.294	
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	0	6.379.375.034	258.873.500	0	0	6.638.248.534	0	7.449.506.903	402.208.800	0	0	7.851.715.703	
2 09	2.09.0.00.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN	0	6.379.375.034	258.873.500	0	0	6.638.248.534	0	7.449.506.903	402.208.800	0	0	7.851.715.703	

KABUPATEN KONAWE SELATAN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan					
		Pendapatan	Belanja				Pendapatan	Belanja					
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	0	224.092.000	800.000.000	0	0	1.024.092.000	0	401.592.000	3.573.220.000	0	0	3.974.812.000
2 10	1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	0	224.092.000	800.000.000	0	0	1.024.092.000	0	401.592.000	3.573.220.000	0	0	3.974.812.000
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	140.000.000	4.917.847.274	1.765.113.100	0	0	6.682.960.374	140.000.000	5.063.118.596	2.534.126.200	0	0	7.597.244.796
2 11	2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	140.000.000	4.917.847.274	1.765.113.100	0	0	6.682.960.374	140.000.000	5.063.118.596	2.534.126.200	0	0	7.597.244.796
2 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	0	6.824.529.586	1.335.214.232	0	0	8.159.743.818	0	7.680.452.518	1.576.589.232	0	0	9.257.041.750
2 12	2.12.0.00.0.00.01.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	0	6.824.529.586	1.335.214.232	0	0	8.159.743.818	0	7.680.452.518	1.576.589.232	0	0	9.257.041.750
2 13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	5.961.656.800	291.058.000	0	0	6.252.714.800	0	6.172.555.138	502.488.000	0	0	6.675.043.138
2 13	2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	5.961.656.800	291.058.000	0	0	6.252.714.800	0	6.172.555.138	502.488.000	0	0	6.675.043.138
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0	15.974.175.528	2.357.589.000	0	0	18.331.764.528	0	16.483.818.698	2.287.289.000	0	0	18.771.107.698
2 14	2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0	15.974.175.528	2.357.589.000	0	0	18.331.764.528	0	16.483.818.698	2.287.289.000	0	0	18.771.107.698

KABUPATEN KONAWA SELATAN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
		Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja						
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		
2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	3.160.000.000	6.724.374.032	2.166.669.320	0	0	8.891.043.352	3.160.000.000	7.047.111.731	2.717.399.060	0	0	9.764.510.791		
2 15	2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN	3.160.000.000	6.724.374.032	2.166.669.320	0	0	8.891.043.352	3.160.000.000	7.047.111.731	2.717.399.060	0	0	9.764.510.791		
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	6.327.857.698	8.251.360.000	0	0	14.579.217.698	0	7.733.329.446	9.280.712.798	0	0	17.014.042.244		
2 16	2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	0	6.327.857.698	8.251.360.000	0	0	14.579.217.698	0	7.733.329.446	9.280.712.798	0	0	17.014.042.244		
2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	0	5.717.166.294	84.851.600	0	0	5.802.017.894	0	6.667.865.744	559.201.600	0	0	7.227.067.344		
2 17	2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	0	5.717.166.294	84.851.600	0	0	5.802.017.894	0	6.667.865.744	559.201.600	0	0	7.227.067.344		
2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	3.165.000.000	6.885.190.544	24.307.710.000	0	0	31.192.900.544	3.165.000.000	7.715.817.519	24.143.710.000	0	0	31.859.527.519		
2 18	2.18.0.00.0.00.01.00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.165.000.000	6.885.190.544	24.307.710.000	0	0	31.192.900.544	3.165.000.000	7.715.817.519	24.143.710.000	0	0	31.859.527.519		
2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	0	5.367.282.402	2.135.028.700	0	0	7.502.311.102	0	6.111.455.410	3.568.028.700	0	0	9.679.484.110		
2 19	2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	0	5.367.282.402	2.135.028.700	0	0	7.502.311.102	0	6.111.455.410	3.568.028.700	0	0	9.679.484.110		
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	0	94.993.000	0	0	0	94.993.000	0	309.673.000	0	0	0	309.673.000		
2 20	2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	0	94.993.000	0	0	0	94.993.000	0	309.673.000	0	0	0	309.673.000		

KABUPATEN KONAWA SELATAN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan						
		Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja						
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	0	54.493.000	0	0	0	0	54.493.000	0	191.270.900	0	0	0	0	191.270.900
2 21	2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	0	54.493.000	0	0	0	0	54.493.000	0	191.270.900	0	0	0	0	191.270.900
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	0	758.962.200	732.500.000	0	0	0	1.491.462.200	0	758.962.200	827.500.000	0	0	0	1.586.462.200
2 22	1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0	758.962.200	732.500.000	0	0	0	1.491.462.200	0	758.962.200	827.500.000	0	0	0	1.586.462.200
2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	0	4.329.381.323	1.254.739.682	0	0	0	5.584.121.005	0	4.458.143.690	1.363.836.682	0	0	0	5.821.980.372
2 23	2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	0	4.329.381.323	1.254.739.682	0	0	0	5.584.121.005	0	4.458.143.690	1.363.836.682	0	0	0	5.821.980.372
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	0	168.048.200	5.100.000	0	0	0	173.148.200	0	168.048.200	5.100.000	0	0	0	173.148.200
2 24	2.232.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	0	168.048.200	5.100.000	0	0	0	173.148.200	0	168.048.200	5.100.000	0	0	0	173.148.200
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1.450.000.000	66.922.617.098	17.833.839.594	0	0	0	84.756.456.692	1.450.000.000	80.361.849.752	36.844.650.539	0	0	0	117.206.500.291
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	150.000.000	11.291.351.615	687.171.700	0	0	0	11.978.523.315	150.000.000	15.477.604.479	1.322.939.700	0	0	0	16.800.544.179
3 25	3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN	150.000.000	11.291.351.615	687.171.700	0	0	0	11.978.523.315	150.000.000	15.477.604.479	1.322.939.700	0	0	0	16.800.544.179
3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	300.000.000	5.281.904.326	2.836.100.000	0	0	0	8.118.004.326	300.000.000	6.726.512.610	3.637.700.000	0	0	0	10.364.212.610
3 26	3.26.0.00.0.00.01.00 DINAS PARIWISATA	300.000.000	5.281.904.326	2.836.100.000	0	0	0	8.118.004.326	300.000.000	6.726.512.610	3.637.700.000	0	0	0	10.364.212.610
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	250.000.000	42.442.542.087	9.356.101.662	0	0	0	51.798.643.749	250.000.000	49.642.320.873	14.005.480.985	0	0	0	63.647.801.858
3 27	3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	0	32.313.325.977	7.758.801.662	0	0	0	40.072.127.639	0	37.653.316.245	12.278.180.985	0	0	0	49.931.497.230
3 27	3.27.0.00.0.00.02.0000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN	250.000.000	10.129.216.110	1.597.300.000	0	0	0	11.726.516.110	250.000.000	11.989.004.628	1.727.300.000	0	0	0	13.716.304.628

KABUPATEN KONAWE SELATAN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan						
		Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja					
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
	HEWAN													
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	0	5.146.928.246	4.590.554.232	0	0	9.737.482.478	0	5.676.075.366	17.267.117.854	0	0	22.943.193.220	
3 30	3.313.30.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0	5.146.928.246	4.590.554.232	0	0	9.737.462.478	0	5.676.075.366	17.267.117.854	0	0	22.943.193.220	
3 3 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	750.000.000	2.534.530.624	293.912.000	0	0	2.828.442.624	750.000.000	2.613.976.224	541.412.000	0	0	3.155.388.224	
3 31	3.313.30.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	750.000.000	2.534.530.624	293.912.000	0	0	2.828.442.624	750.000.000	2.613.976.224	541.412.000	0	0	3.155.388.224	
3 32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	0	225.360.200	70.000.000	0	0	295.360.200	0	225.360.200	70.000.000	0	0	295.360.200	
3 32	2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0	225.360.200	70.000.000	0	0	295.360.200	0	225.360.200	70.000.000	0	0	295.360.200	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	0	95.015.235.060	19.188.093.731	0	0	114.203.328.791	0	108.073.180.035	29.173.396.581	0	0	137.246.576.616	
4 01	SEKRETARIAT DAERAH	0	54.954.467.464	17.018.509.231	0	0	71.972.976.695	0	63.081.019.927	26.227.672.081	0	0	89.308.692.008	
4 01	4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 01	4.010.00.0.00.01.0001 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	0	750.008.350	500.000.000	0	0	1.250.008.350	0	1.765.950.150	164.175.050	0	0	3.408.125.200	
4 01	4.01.0.00.0.00.01.0002 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	0	10.283.684.977	97.321.263	0	0	10.381.006.240	0	12.989.614.966	97.321.263	0	0	13.086.936.229	
4 01	4.01.0.00.0.00.01.0003 BAGIAN HUKUM	0	629.669.900	119.000.000	0	0	748.669.900	0	1.384.223.900	201.868.600	0	0	1.586.092.500	
4 01	4.01.0.00.0.00.01.0004 BAGIAN KERJASAMA	0	679.255.000	70.745.000	0	0	750.000.000	0	755.627.900	89.368.000	0	0	844.995.900	
4 01	4.010.00.0.00.01.0005 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	0	1.049.994.788	0	0	0	1.049.994.788	0	1.354.310.188	109.547.600	0	0	1.463.857.788	
4 01	4.01.0.00.0.00.01.0006 BAGIAN ORGANISASI	0	1.064.770.000	185.230.000	0	0	1.250.000.000	0	1.514.770.000	280.230.000	0	0	1.795.000.000	
4 01	4.01.0.00.0.00.01.0007 BAGIAN PEREKONOMIAN	0	749.972.600	0	0	0	749.972.600	0	1.256.246.800	93.725.800	0	0	1.349.972.600	
4 01	4.01.0.00.0.00.01.0008 BAGIAN ADMINISTRASI	0	680.077.600	69.921.700	0	0	749.999.300	0	822.397.600	269.921.700	0	0	1.092.319.300	

KABUPATEN KONAWE SELATAN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan						
		Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja					
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
	PEMBANGUNAN													
4 0 1	4.01.0.00.0.0001.0009	0	733.924.800	10.032.075.000	0	0	10.765.999.800	0	1.115.541.800	12.713.875.000	0	0	13.829.416.800	
4 0 1	4.01.0.00.0.00.01.0010	0	18.773.620.468	5.846.870.000	0	0	24.620.490.468	0	210.624.974.424	8.500.370.000	0	0	29.582.867.424	
4 0 1	4.01.0.00.0.00.01.0011	0	728.543.925	21.925.800	0	0	750.469.725	0	1.373.510.625	21.925.800	0	0	1.395.436.425	
4 0 1	4.01.0.00.0.00.01.0012	0	18.830.945.056	75.420.468	0	0	18.906.365.524	0	17.666.328.574	2.207.343.268	0	0	19.873.671.842	
4 0 2	SEKRETARIAT DPRD	0	40.060.767.596	2.169.584.500	0	0	42.230.352.096	0	44.992.160.108	2.945.724.500	0	0	47.937.884.608	
4 0 2	4.02.0.00.0.00.01.0000	0	40.060.767.596	2.169.584.500	0	0	42.230.352.096	0	44.992.160.108	2.945.724.500	0	0	47.937.884.608	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.511.124.059.767	140.472.092.767	14.239.139.305	12.600.000.000	341.664.461.900	508.975.693.972	1.534.125.189.111	136.679.733.136	22.204.403.516	12.600.000.000	343.985.607.000	515.469.743.652	
5 0 1	PERENCANAAN	0	8.440.294.058	1.134.301.600	0	0	9.574.595.658	0	8.741.740.470	942.450.000	0	0	9.684.190.470	
5 0 1	5.01.0.00.0.00.01.0000	0	8.440.294.058	1.134.301.600	0	0	9.574.595.658	0	8.741.740.470	942.450.000	0	0	9.684.190.470	
5 0 2	KEUANGAN	1.511.124.059.767	116.123.837.608	6.744.248.100	12.600.000.000	341.664.461.900	477.132.547.608	1.534.125.189.111	111.879.603.459	14.259.706.500	12.600.000.000	343.985.607.000	482.724.916.959	
5 0 2	5.02.0.00.0.00.01.0000	1.470.833.489.949	107.361.094.349	5.747.065.100	12.600.000.000	341.664.461.900	467.372.621.349	1.493.834.619.293	102.829.422.300	13.163.155.000	12.600.000.000	343.985.607.000	472.578.184.300	
5 0 2	5.02.0.00.0.00.02.0000	40.290.569.818	8.762.743.259	997.183.000	0	0	9.759.926.259	40.290.569.818	9.050.181.159	1.096.551.500	0	0	10.146.732.659	
5 0 3	KEPEGAWAIAN	0	7.875.840.294	2.898.538.400	0	0	10.774.378.694	0	7.830.200.806	3.062.110.400	0	0	10.892.311.206	
5 0 3	5.03.5.04.0.00.01.0000	0	7.875.840.294	2.898.538.400	0	0	10.774.378.694	0	7.830.200.806	3.062.110.400	0	0	10.892.311.206	
5 0 4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0	4.125.892.000	0	0	0	4.125.892.000	0	3.774.940.400	0	0	0	3.774.940.400	
5 0 4	5.03.5.04.0.00.01.0000	0	4.125.892.000	0	0	0	4.125.892.000	0	3.774.940.400	0	0	0	3.774.940.400	
5 0 5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0	3.906.228.807	3.462.051.205	0	0	7.368.280.012	0	4.453.248.001	3.940.136.616	0	0	8.393.384.617	
5 0 5	5.05.0.00.0.00.01.0000	0	3.906.228.807	3.462.051.205	0	0	7.368.280.012	0	4.453.248.001	3.940.136.616	0	0	8.393.384.617	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN	0	11.592.397.558	8.413.022.000	0	0	20.005.419.558	0	12.541.346.914	10.373.758.268	0	0	22.915.105.182	

KABUPATEN KONAWE SELATAN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan							
		Pendapatan	Belanja				Pendapatan	Belanja						
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
	PEMERINTAHAN													
6 01	INSPEKTORAT DAERAH	0	11.592.397.558	8.413.022.000	0	0	20.005.419.558	0	12.541.346.914	10.373.758.268	0	0	22.915.105.182	
6 01	6.010.000.000.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH	0	11.592.397.558	8.413.022.000	0	0	20.005.419.558	0	12.541.346.914	10.373.758.268	0	0	22.915.105.182	
7	UNSUR KEWILAYAHAN	0	78.503.036.586	2.901.594.708	0	0	81.404.631.294	0	78.628.326.645	3.192.335.008	0	0	81.820.661.653	
7 01	KECAMATAN	0	78.503.036.586	2.901.594.708	0	0	81.404.631.294	0	78.628.326.645	3.192.335.008	0	0	81.820.661.653	
7 01	7.010.000.000.01.0000 KECAMATAN PALANGGA	0	2.942.621.440	97.190.000	0	0	3.039.811.440	0	2.914.893.590	67.600.000	0	0	2.982.493.590	
7 01	7.010.000.000.01.0001 KELURAHAN PALANGGA	0	263.300.000	36.700.000	0	0	300.000.000	0	278.300.000	36.700.000	0	0	315.000.000	
7 01	7.010.000.000.02.0000 KECAMATAN LANDONO	0	3.197.108.647	89.621.000	0	0	3.286.729.647	0	3.183.933.563	89.621.000	0	0	3.273.554.563	
7 01	7.010.000.000.02.0001 KELURAHAN LANDONO	0	300.000.000	0	0	0	300.000.000	0	315.000.000	0	0	0	315.000.000	
7 01	7.010.000.000.03.0000 KECAMATAN LAINEA	0	2.253.816.612	745.700.000	0	0	2.328.386.612	0	2.250.216.390	224.570.000	0	0	2.474.786.390	
7 01	7.010.000.000.04.0000 KECAMATAN TINANGGEEA	0	4.568.596.720	138.165.200	0	0	4.706.761.920	0	4.623.663.898	138.165.200	0	0	4.761.829.098	
7 01	7.010.000.000.04.0001 KELURAHAN NGAPAAHA	0	265.396.020	34.599.600	0	0	299.995.620	0	280.396.020	34.599.600	0	0	314.995.620	
7 01	7.010.000.000.04.0002 KELURAHAN TINANGGEEA	0	300.000.000	0	0	0	300.000.000	0	314.950.000	0	0	0	314.950.000	
7 01	7.010.000.000.05.0000 KECAMATAN RANOMEETO	0	4.862.371.886	22.000.000	0	0	4.884.371.886	0	4.785.900.808	13.500.000	0	0	4.799.400.808	
7 01	7.010.000.000.05.0001 KELURAHAN RANOMEETO	0	300.000.000	0	0	0	300.000.000	0	315.000.000	0	0	0	315.000.000	
7 01	7.010.000.000.06.0000 KECAMATAN KONDA	0	4.628.884.923	71.200.000	0	0	4.700.084.923	0	4.564.886.476	71.200.000	0	0	4.636.086.476	
7 01	7.010.000.000.06.0001 KELURAHAN KONDA	0	269.800.000	30.200.000	0	0	300.000.000	0	284.800.000	30.200.000	0	0	315.000.000	
7 01	7.010.000.000.07.0000 KECAMATAN KOLONO	0	2.593.179.400	260.000.000	0	0	2.853.179.400	0	2.581.360.858	259.950.000	0	0	2.841.310.858	
7 01	7.010.000.000.07.0001 KELURAHAN KOLONO	0	248.000.000	52.000.000	0	0	300.000.000	0	275.750.000	39.250.000	0	0	315.000.000	
7 01	7.010.000.000.08.0000 KECAMATAN MORAMO	0	2.985.570.206	27.322.000	0	0	3.012.892.206	0	2.966.836.384	27.322.000	0	0	2.994.158.384	
7 01	7.010.000.000.08.0001 KELURAHAN LAPUKO	0	299.998.900	0	0	0	299.998.900	0	314.998.900	0	0	0	314.998.900	
7 01	7.010.000.000.09.0000 KECAMATAN ANDOOL	0	3.365.698.410	85.942.000	0	0	3.451.640.410	0	3.429.201.448	85.942.000	0	0	3.515.143.448	
7 01	7.010.000.000.09.0001 KELURAHAN ALANGGA	0	299.920.200	0	0	0	299.920.200	0	314.920.200	0	0	0	314.920.200	
7 01	7.010.000.000.09.0002 KELURAHAN POTORO	0	300.080.000	0	0	0	300.080.000	0	315.080.000	0	0	0	315.080.000	

KABUPATEN KONAWA SELATAN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
		Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja						
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		
7 01 7.01.0.000.0.00.10.0000	KECAMATAN ANGATA	0	4.153.896.936	310.470.000	0	0	0	4.464.366.936	0	4.002.170.454	348.389.000	0	0	4.350.559.454	
7 01 7.010.00.0.0011.0000	KECAMATAN LAONTI	0	2.388.607.262	62.250.000	0	0	0	2.450.857.262	0	2.378.106.614	62.250.000	0	0	2.440.356.614	
7 01 7.01.0.000.0.00.12.0000	KECAMATAN LALEMBUU	0	2.334.644.090	153.000.000	0	0	0	2.487.644.090	0	2.339.669.814	157.000.000	0	0	2.496.669.814	
7 01 7.01.0.000.0.00.12.0001	KELURAHAN ATARI INDAH	0	248.032.960	37.700.000	0	0	0	285.732.960	0	263.032.960	37.700.000	0	0	300.732.960	
7 01 7.01.0.000.0.00.13.0000	KECAMATAN MOWILA	0	3.109.809.550	93.500.000	0	0	0	3.203.309.550	0	3.063.405.290	93.500.000	0	0	3.156.905.290	
7 01 7.01.0.000.0.00.14.00	KECAMATAN BUKE	0	2.630.501.315	64.000.000	0	0	0	2.694.501.315	0	2.611.212.704	64.000.000	0	0	2.675.212.704	
7 01 7.01.0.000.0.00.15.0000	KECAMATAN BENUA	0	2.342.388.046	157.148.900	0	0	0	2.499.536.946	0	2.401.110.392	120.198.600	0	0	2.521.308.992	
7 01 7.01.0.000.0.00.16.00	KECAMATAN MORAMO UTARA	0	2.895.614.043	96.990.700	0	0	0	2.992.604.743	0	3.002.585.889	96.400.000	0	0	3.098.985.889	
7 01 7.01.0.000.0.00.16.0001	KELURAHAN LALOWARU	0	265.688.320	34.307.700	0	0	0	299.996.020	0	280.685.320	34.307.700	0	0	314.993.020	
7 01 7.01.0.000.0.00.17.0000	KECAMATAN BASALA	0	1.773.544.399	202.410.000	0	0	0	1.975.954.399	0	1.778.740.231	202.410.000	0	0	1.981.150.231	
7 01 7.01.0.000.0.00.18.00	KECAMATAN RANOMBEETO BARAT	0	3.941.109.238	71.291.700	0	0	0	4.012.400.938	0	3.879.194.988	70.000.000	0	0	3.949.194.988	
7 01 7.01.0.000.0.00.19.0000	KECAMATAN BAITO	0	1.993.860.530	66.774.000	0	0	0	2.060.634.530	0	1.902.513.374	304.696.400	0	0	2.207.209.774	
7 01 7.010.00.0.00.20.0000	KECAMATAN LAEYA	0	4.438.215.308	45.000.000	0	0	0	4.483.215.308	0	4.508.007.768	45.000.000	0	0	4.553.007.768	
7 01 7.01.0.000.0.00.20.0001	KELURAHAN AMBALODANGGE	0	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	0	315.000.000	0	0	0	315.000.000	
7 01 7.01.0.000.0.00.20.0002	KELURAHAN PUNGALUKU	0	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	0	315.000.000	0	0	0	315.000.000	
7 01 7.010.00.0.00.21.0000	KECAMATAN PALANGGA SELATAN	0	2.708.340.165	113.610.498	0	0	0	2.821.950.663	0	2.713.240.292	111.612.498	0	0	2.824.852.790	
7 01 7.01.0.000.0.00.21.0001	KELURAHAN AMONDO	0	247.189.800	52.810.200	0	0	0	300.000.000	0	262.189.800	52.810.200	0	0	315.000.000	
7 01 7.010.00.0.00.22.0000	KECAMATAN WOLASI	0	2.030.840.096	112.820.000	0	0	0	2.143.660.096	0	2.083.287.156	107.891.400	0	0	2.191.178.556	
7 01 7.01.0.000.0.00.23.0000	KECAMATAN ANDOLOO BARAT	0	2.194.893.764	87.841.810	0	0	0	2.282.735.574	0	2.216.353.486	77.890.010	0	0	2.294.243.496	
7 01 7.01.0.000.0.00.24.0000	KECAMATAN KOLONO TIMUR	0	1.846.662.730	31.129.000	0	0	0	1.877.791.730	0	1.836.526.614	31.129.000	0	0	1.867.655.614	
7 01 7.01.0.000.0.00.25.0000	KECAMATAN SABULAKOA	0	2.114.854.670	89.030.400	0	0	0	2.203.885.070	0	2.166.204.964	56.530.400	0	0	2.222.735.364	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0	6.926.781.940	122.500.000	0	0	0	7.049.281.940	0	38.289.777.505	488.017.500	0	0	38.777.795.005	
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	6.926.781.940	122.500.000	0	0	0	7.049.281.940	0	38.289.777.505	488.017.500	0	0	38.777.795.005	

KABUPATEN KONAWE SELATAN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
		Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja				
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
8 01 8.010.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	6.926.781.940	122.500.000	0	0	7.049.281.940	0	38.289.777.505	488.017.500	0	0	38.777.795.005
TOTAL		1.561.614.773.391	1.059.788.083.959	364.270.698.119	12.600.000.000	341.664.461.900	1.778.323.243.978	1.582.029.011.203	1.138.432.825.044	489.370.137.390	12.600.000.000	343.985.607.000	1.984.388.569.434



Bupati Konawe Selatan

SURINUDDIN DANGGA

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. KA. BAPPEDA	
3. KA. BKAD	
4. KA. BAPENDA	
5. KABID. ANGGARAN	
6.	